

KOLABORATIF PENGELOLAAN PARIWISATA TELUK KILUAN (Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism)

Novita Tresiana¹.dan Noverman Duadji²

^{1 2} Program Studi Administrasi Publik Fisip Universitas Lampung
novitatresiana@yahoo.co.id

ABSTRACT

The collaborative process is a key dimension of communications-based tourism management planning. The collaborative process requires the participation of the community, the existence of equality of power and the competence of actors as a guarantee of the sustainability of the dialogue of authentic citizens. The purpose of this article describes whether the prerequisites that are owned and required for the creation of a collaborative process in the management of Teluk Kiluan tourism exist, so that collaborative processes do not produce a pseudo-democracy but benefit for the community. The method used is qualitative descriptive. The data collection of this study is done through the inventory stages of both primary and secondary data. The results of the study find that the low requirements of Teluk Kiluan indicate a non-collaborative community condition requiring changes in policy strategies through government support, community participation, direct benefits, local resource use, local institutional strengthening and synergy between levels and regions.

Keywords: Collaborative, Planning and Community

PENDAHULUAN

Studi tentang kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan, khususnya perencanaan dilatari oleh pemikiran kegagalan negara (*failed state*) dalam mengelola pembangunan, khususnya sektor pariwisata dikarenakan model kebijakan perencanaan pengelolaan yang keliru, sangat sentralistis, linear (*top down*) dan menjadikan masyarakat sebagai obyek pembangunan untuk mendukung target-target ekonomi pemerintah, sehingga masyarakat termarginal secara politik, budaya, ekonomi, sosial, dan pengelolaan lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini ini tidak lagi sesuai, disebabkan bukan saja karena hasil pembangunan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga tidak lagi sesuai dengan isu-isu nasional tentang demokrasi, reformasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Studi yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2016) mendapati logika kegagalan yang sama terjadi juga dalam konteks perencanaan pembangunan desa di sepuluh desa di Kabupaten Lampung Selatan. Terdapat kecenderungan *psudo demokrasi*, dimana institusi masyarakat yang lemah, institusi pemerintah saja yang kuat, tanggungjawab pemerintah lokal setempat untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi warganya sama sekali tidak ada. Disisi lain nampak mulai semakin menguat loyalitas komunitas dan menjadikan komunitas sebagai sumber keamanan dan kesempatan ekonomi. Kondisi di atas berakibat legitimasi negara makin lemah dimata warganya, sehingga diperlukan kolaborasi yang sinergis bukan *psudo* dalam pengelolaan pembangunan, termasuk sektor pariwisata.

Urgensi sektor pariwisata sebagai locus tulisan didasari pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, dilematis otonomi daerah dimana pemerintah daerah berupaya menaikkan pendapatan asli daerahnya, sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai *leading sector* dalam capaian peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); **Kedua**, adanya perubahan perspektif pengelolaan pada sektor pariwisata yang mengalami pergeseran mulai dari *high-volume production of standart commodities* menjadi *high-volume production of unque*

commodities. Artinya model pengelolaan pariwisata yang massal dengan banyak mengundang dan mengikutsertakan investor swasta bahkan asing, perlindungan yang berlebihan terhadap sektor swasta, banyak mengeluarkan izin pengelolaan yang bersifat eksklusif, menjadi sangat jauh dari jangkauan masyarakat lokal, bahkan berdampak pada sosial, ekonomi serta lingkungan yang merugikan terutama bagi komunitas lokal.

Kasus pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan adalah salah satu contoh yang memperlihatkan bahwa proses pembangunan saat ini tidak lagi hanya menjadi dominasi pemerintah. Kritik bahwa pembangunan hanya menjadi kepentingan pihak tertentu, menyadarkan pemerintah perlunya *collaborative governance* yang lebih beretika. Urgensi pemangku kepentingan, warga duduk bersama mengambil keputusan publik adalah hasil perencanaan dan konsensus melalui proses dialog tatap muka secara demokratis (Anshell & Gash, 2007; Innes & Booher, 2010).

Kaitan dengan perencanaan terkait pariwisata, paradigma perencanaan telah mengalami pergeseran kearah pembangunan berbasis kolaborasi. Salah satu unsur penting dari perencanaan kolaborasi adalah basis komunikasi. Perspektif sebelumnya dikemukakan oleh Tresiana (2015) menggambarkan bagaimana perencanaan berlandaskan *rational planning*, yang seringkali mengabaikan adanya realitas politik. Ini kemudian menjadi dasar bagi Charles Lindbloom mengajukan gagasan tentang *disjointed incrementalism* dan Amitai Ezioni dengan gagasan *Mixed-scanning*. Kendati terjadi perubahan pendekatan, faktanya tetap saja perencanaan hanya melibatkan pengambil keputusan.

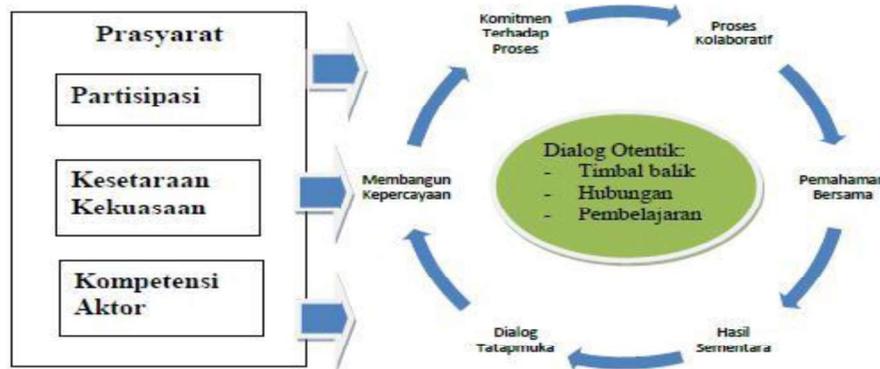
Friedman (2011) lebih lanjut mengemukakan pemikiran tentang sebuah konsep perencanaan transaktif, dimana dimana perencanaan seyogyanya di susun berdasarkan dialog antara perencana dengan klien-nya. Friedman (2011) juga mengemukakan bahwa perencanaan dalam tataran publik, dimana bahwa perencanaan merupakan suatu bentuk aplikasi atas pengetahuan ke dalam tindakan dan mengelompokkan perencanaan sebagai *social reform, policy analysis, social learning, dan social mobilization*. Perubahan pendekatan ini menjadikan perencanaan tidak hanya milik pemerintah, tetapi milik komunitas masyarakat. Inilah yang menjadi point penting studi ini.

Tulisan ini mencoba menjelaskan apakah prasyarat-prasyarat yang dimiliki dan dibutuhkan untuk terciptanya proses kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan telah ada, sehingga proses kolaboratif tidak menghasilkan *pseudo* demokrasi melainkan menguntungkan komunitas masyarakat.

Anshell & Gash (2008) dan Innes & Booher (2000) mengkonfilasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi yang sebenarnya adalah *citizen power* seperti dikemukakan dalam tangga partisipasi menurut Arnstein. (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan. Hal ini berarti tidak ada dominasi oleh pihak tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati. (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten. Dialog yang terjadi harus merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi konsensus, sehingga memerlukan aktor yang mendukung, dalam arti memiliki kompetensi dan lam berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan untuk kepentingan bersama.

Perencanaan Berbasis Komunikasi

Proses Kolaboratif



Gambar 1. Model Prasyarat Proses Kolaboratif Perencanaan
Sumber: Ansell & Gash (2007) dan Innes & Booher (2000)

Metode Penelitian

Studi dilakukan di Pekon Teluk Kiluan yang terletak di Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif, yang berupaya menggambarkan prasyarat-prasyarat proses kolaborasi perencanaan pengelolaan pariwisata. Fokus studi adalah deskripsi prasyarat-prasyarat proses kolaborasi dari dimensi berupa: adanya partisipasi, adanya kesetaraan kekuasaan dan adanya aktor-aktor yang kompeten. Pengumpulan data studi ini dilakukan melalui tahapan inventarisasi data baik primer maupun sekunder, koleksi data dilakukan berdasarkan jenisnya, yaitu data primer dan data sekunder. Khusus data sekunder meliputi peta wilayah, demografi, sejarah, data lembaga-lembaga formal/informal, data berbagai saluran, ruang publik, data nilai-nilai lokal, bahkan data yang telah diolah dan dipublikasikan secara umum. Jenis data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai pihak seperti instansi terkait dan pusat-pusat dokumentasi yang ada. Khusus Data primer, langsung digali dari realitas lapangan melalui beberapa tehnik: (a). Kuesioner (*questionnaire*); (b). Wawancara mendalam (*depth interview*); (c). Observasi; (d). Pemetaan Partisipatif dan (e). Diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*). Penggalan data dengan banyak tehnik ini dapat bermanfaat sebagai *cross-check* validitas data. Selanjutnya data yang terkumpul, dianalisis dengan analisis kualitatif, dengan model interaktif Miles dan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Konsepsi perkembangan pendekatan perencanaan sebagaimana dikutip Friedman (2011) baik perencanaan transaktif, perencanaan kolaboratif, perencanaan komunikatif, perencanaan *deliberatif partisipatif*, dan perencanaan konsensus, memiliki penekanan yang relatif sama dalam hal menekankan pentingnya kerjasama dengan didasari komunikasi antar

pemangku kepentingan. Proses kerjasama tersebut akan berlangsung dengan baik jika terdapat komunikasi dalam bentuk kata kunci —dialog— didalamnya. Dalam perencanaan transaktif, dialog yang terjadi adalah *life dialogue*, yang dipertegas oleh Innes dan Booher (2000) sebagai *authentic dialogue*. Dalam hal ini, setiap aktor yang duduk bersama saling menghargai, empati, terjadi hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Dengan demikian, dialog hanya akan terjadi jika para pemangku kepentingan berpartisipasi dan duduk bersama dalam memecahkan permasalahan.

Partisipasi sendiri hanya akan terjadi jika mereka memiliki kepentingan dan memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya, dan partisipasi tersebut hanya akan terjadi jika ada saling ketergantungan dan kepercayaan. Kerjasama melalui dialog dan partisipasi diarahkan pada pembentukan konsensus (Woltjer,2000). Proses yang memuat aktivitas dialog, partisipasi, dan berorientasi kepada keputusan bersama, terangkum dalam suatu proses kolaboratif. Dengan demikian, dalam suatu pendekatan perencanaan berbasis komunikasi, terjadi proses kolaboratif.

Konsepsi proses kolaboratif, merupakan suatu proses *adaptive system* dimana pendapat-pendapat yang berbeda dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu konsensus. Anshell dan Gash (2007) berupaya memetakan suatu model proses kolaboratif yang dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (*face-to-face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*). Innes dan Booher (2010) mengembangkan model *Network Dynamic* untuk memperlihatkan bahwa proses kolaborasi menggambarkan jejaring kolaboratif dimana terdapat keragaman, saling ketergantungan dan dialog otentik didalamnya. Maksudnya adalah, *pertama*, jejaring kolaboratif memiliki keragaman agen-agen, *kedua*, agen-agen berada dalam situasi mampu untuk saling memenuhi kepentingan masing-masing dan menyadari adanya saling ketergantungan diantara mereka, dan *ketiga*, terdapat dialog otentik (*authentic dialogue*) dimana komunikasi mengalir melalui jejaring secara akurat dan dapat dipercaya diantara para peserta. Dalam dialog otentik, terdapat timbal balik (*reciprocity*), hubungan (*relationship*), pembelajaran (*learning*), kreatifitas (*creativity*), dan menghasilkan adaptasi dari sistem yang ada. Hal ini berarti bahwa para peserta (aktor) berbi cara mewakili kepentingan kelompoknya, saling menghormati, dan berbicara dengan akurat. Tentu saja hal ini membutuhkan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman diantara para aktor.

Selanjutnya proses kolaboratif terjadi jika terdapat beberapa prasyarat. Ada beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi yang sebenarnya adalah *citizen power* seperti dikemukakan dalam tangga partisipasi menurut Arnstein. (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan. Hal ini berarti tidak ada dominasi oleh pihak tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati. (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten. Dialog yang terjadi harus merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi konsensus, sehingga memerlukan aktor yang mendukung, dalam arti memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan untuk kepentingan bersama.

Prasyarat seperti dalam gambar 1 di atas tergambar dalam tabel 1 dan tabel 2 berikut ini :

Tabel 1.

Kesenjangan Prasyarat Proses Kolaborasi

PARTISIPASI		KESETARAAN KEKUASAAN		KOMPETENSI	
Kondisi Ideal	Kondisi Nyata	Kondisi Ideal	Kondisi Nyata	Kondisi Ideal	Kondisi Nyata
Proses kolaboratif melibatkan para stakeholders dan tingkat partisipasi diharapkan tinggi	Partisipasi rendah, sebatas kehadiran	Para aktor dalam proses kolaborasi Kesempatan sama dalam mengemukakan pendapat, saling menghargai informasi, informasi berbagi	Adanya dominasi pihak/kelompok tertentu di luar komunitas masyarakat	Para aktor kompeten untuk melakukan komunikasi dan menguasai substansi	Komunitas masyarakat memiliki tingkat kompetensi rendah dan dilihat dari tingkat pendidikan dan keberdayaan lembaga

Sumber: Tresiana dan Duadji (2017)

Tabel 2.

Karakteristik Komunitas Masyarakat Teluk Kiluan dari Sisi Partisipasi, Kesetaraan kekuasaan dan Kompetensi

Tingkat Partisipasi Rendah	Tingkat Kesetaraan Kekuasaan Rendah	Tingkat Kompetensi Aktor Rendah
Masih rendah, terlihat keterlibatannya dalam musrenbangdes	Presentase penduduk tamat sekolah rendah-sedang (SD,SMP dan SMA), kelembagaan lokal ada dan hidup dan kelembagaan pariwisata telah terbentuk, hanya saja dalam pengambilan keputusan lembaga lokal/masyarakat belum mendominasi, masih dikuasi oleh kelompok pemerintah	Masih rendah, hanya sebatas berkomunikasi dalam pengelolaana dan membagi kegiatan/atraksi budaya, belum mengarah pada sinergitas, pemberdayaan dan advokasi

Sumber: Tresiana dan Duadji (2017)

Dua tabel di atas memperlihatkan bahwa proses kolaboratif akan dapat berjalan dengan baik dengan partisipasi aktif masyarakatnya diwakili oleh aktor-aktor yang memiliki kemampuan berdialog. Dengan melihat prasyarat pada tabel di atas, maka proses kolaboratif tidak dapat dengan mudah terwujud pada masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, serta kepemimpinan yang tidak mendukung. Kondisi seperti ini dijumpai pada masyarakat Teluk Kiluan. Hal ini terjadi lebih karena masalah budaya dan tingkat pendidikan masyarakat yang tidak mendukung. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan masih terdapat banyak kelemahan terutama melalui jalur musrenbang

Dikatakan oleh Tresiana dan Duadji (2017) dengan Berbasis hasil wawancara, observasi dan FGD dengan informan-informan terkait di Teluk Kiluan, ditemukan secara

umum pelaksanaan musrenbang desa hanya menjadi agenda rutin, tahunan dan masih bersifat formalitas. Secara substantif belum mencerminkan agenda persoalan dan kebutuhan warga desa. Pelaksanaan masih didominasi oleh pemerintah daerah, sementara unsur-unsur stakeholders memiliki keterwakilan yang rendah. Proses pelaksanaan musrenbang Desa, baru sebatas pada kegiatan pengumpulan data dukung untuk kegiatan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten sehingga program-program yang disusun lebih merupakan rencana pembangunan pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten. Berikut tabel kelemahan musrenbangdes di Pekon Teluk Kiluan.

Tabel 3.
Kelemahan Musrenbangdes Pekon Teluk Kiluan

Dimensi/Substansi Musrenbangdes	Informasi
Aktor Utama	Pemerintah Desa
Kepesertaan terbatas	Terbatas/terpilih
Sifat/Bentuk pertemuan	Formal
Isi kegiatan	Sosialisasi program
Kepanitiaan	Pemerintah desa/pekon
Mekanisme musrenbang	Prosedural
Keberadaan lembaga lokal	Pasif

Sumber: Tresiana dan Duadji (2017)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, berikut ini adalah analisis terhadap proses yang akan terjadi pada perencanaan pengelolaan pariwisata Pekon teluk Kiluan dengan menggunakan sudut pandang kolaboratif dalam kerangka teori perencanaan berbasis komunikasi. Proses kolaboratif menurut (Anshel dan Gash, 2007; Innes & Boofer, 2000) memiliki prasyarat perlunya partisipasi, Kesetaraan kekuasaan dan kompetensi aktor. Karenanya, jika menggunakan parameter prasyarat bagi terciptanya proses kolaboratif, maka sesungguhnya Pekon Teluk Kiluan belum mencerminkan masyarakat kolaboratif. Ketiga prasyarat itu akan menjadi landasan dan jaminan keberlanjutan rangkaian proses sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi permasalahan; (2) Mengidentifikasi pemangku kepe ntingan; (3) Membangun ke percayaan, (4) Membangun pemahaman bersama; (5) Menghasilkan upaya pemecahan masalah bersama; dan (6) Membangun komitmen bersama. Dua tahap pertama merupakan tahapan pra-proses kolaboratif, sedangkan empat tahap berikutnya merupakan bagian dari proses kolaboratif. Hal ini sesuai dengan definisi dari proses kolaboratif yaitu suatu proses yang membawa para pemangku kepentingan baik publik maupun swasta, ke dalam suatu forum bersama lembaga publik, untuk terlibat dalam pembuatan keputusan berorientasi konsensus (Anshel dan Gash, 2007). Empat tahap berikutnya merupakan proses kolaboratif. Proses kolaboratif merupakan upaya membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan adalah bagian dari suatu komunitas sosial dalam permasalahan tersebut yang memerlukan pengakuan terhadap keberadaannya.

Hal ini tentunya menjadi pekerja rumah besar bagi pemerintah setempat untuk mengganti model pembangunan masyarakat yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan pariwisata. Sebuah konsepsi gagasan model pembangunan masyarakat (*Community development*), sebagaimana dikemukakan UNDP, pada intinya menekankan kesuksesan pembangunan pariwisata bergantung kolaborasi sinergi pemerintah dan masyarakat. Karenanya perlu penguatan sisi masyarakat, sehingga pembangunan akan dapat melahirkan produk-produk baru yang bermanfaat bagi masyarakatnya, dan berkesesuaian dengan

kebutuhan masyarakatnya. Selain itu juga diperlukan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana posisi masyarakat dan pemerintah, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Model pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism (CBT)*, merupakan model aplikasi dari *Community development*. Model ini menekankan bagaimana masyarakat lokal terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan pembangunan pariwisata mulai dari tahap awal pembangunan sampai pengoperasian yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Ada beberapa prinsip dasar dari model *Community Based Tourism* (Nasikun,2000), yaitu : 1) Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam sektor pariwisata, 2) Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek pariwisata, 3) Mengembangkan kebanggaan komunitas, 4) Mengembangkan kualitas hidup komunitas, 5) Menjamin keberlanjutan lingkungan, 6) Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal, 7) Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas.

Ada lima dimensi yang menjadi titik tekan model *Community Based Tourism (CBT)* sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2011), yakni : **Pertama**, Dimensi ekonomi dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata. **Kedua**, Dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas. **Ketiga**, Dimensi budaya dengan indikator berupa dorongan pada masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal. **Keempat**, Dimensi lingkungan dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi. **Kelima**, Dimensi politik dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Terakhir, Nugroho (2011) menekankan perlunya beberapa elemen kunci daya dukung keberhasilan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu: **Pertama**, adanya dukungan pemerintah, dimana model CBT membutuhkan dukungan struktur yang multi institusional agar sukses dan berkelanjutan. **Kedua**, partisipasi dari masyarakat dan stakeholders. **Ketiga**, pembagian keuntungan yang adil, baik keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata, tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha. **Keempat**, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan, dimana salah satu kekuatan pariwisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat, dan dengan dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, maka menimbulkan kepedulian, penghargaan diri sendiri dan kebanggaan pada seluruh anggota masyarakat. **Kelima**, penguatan institusi lokal. **Keenam**, membangun keterkaitan level daerah dan nasional dan regional, dimana komunitas lokal seringkali tidak mendapatkan manfaat, namun justru pendatang yang memetik keuntungan lebih banyak.

KESIMPULAN

Untuk dapat memenuhi prasyarat masyarakat kolaboratif dalam perencanaan pengelolaan pariwisata, maka perlu dikembangkan model pengelolaan pariwisata berbasis komunitas masyarakat. Implementasi model berbasis masyarakat (komunitas) di dasari lebih banyak keuntungan yang diperoleh yang bukan saja ekonomi, tetapi jauh lebih penting adalah

keberlanjutan dari wisata Kiluan serta kelestarian di sekitar lingkungan pariwisata. Beberapa sub-sub sistem yang mendukung terbentuknya masyarakat kolaboratif berbasis komunitas adalah penguatan modal sosial, penguatan basis pengambilan keputusan, penguatan kelembagaan masyarakat lokal, dan tentunya potensi wisata Kiluan. Untuk ketercapaian politik Teluk Kiluan diperlukan dukungan pelaku pariwisata dan perlu dilakukan kajian mendalam dan uji sub-sub sistem yang memiliki pengaruh yang kuat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. dan Gash, A., (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Publik Administration Research and Theory, 18:543-571., doi: 10.1093/jopart/mum032 First published, November 13, 2007. Diunduh pada tanggal 28 November 2010.
- Friedman, John. (2011). *Insurgencies, Essay in Planning Theory*. Routledge, London and New York.
- Innes, J.E. dan Booher, D.E. (2010). *Beyond Collaboration Democratic Governance for a Resilient Society dalam Planning with Complexity Complexity, An Introduction to collaborative rationality or public policy*, pp 196-215., Routledge, Oxon.
- Innes, J.E. dan Booher, D.E. (2000). *Collaborative Dialogue as a Policy Making Strategy, Institute of Urban and Regional Development UC Berkeley, IURD Working Paper*, <http://escholarship.org/uc/item/8523r5zt>. Diunduh pada tanggal 13 Desember 2010.
- Miles, M. dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohandi Rohidi. Jakarta: UI Press
- Nugroho, Iwan. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan (Cetak Pertama)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Nasikun. 2000. *Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas*. Penerbit Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta
- Tresiana, Novita dan Duadji, Noverman. 2017. *Model Pengembangan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas (Studi di Wilayah Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus)*. Laporan Kemajuan Penelitian Produk Terapan. Bandar Lampung. Unila. Tidak Dipublikasikan.
- Tresiana, Novita dan Duadji, Noverman. 2016. *Multi Stakeholders Governance Body Model in Achieving The Excellence Public Policy* dalam Jurnal Mimbar Vol 32 No.2, Des 2016 Hal 401-411. Penerbit P2U-LPPM Unisba. Bandung
- Tresiana, Novita. 2015. *Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Woltjer, Johan. (2000). *Consensus Planning, Therelevance of Communicative Planning Theory in Dutch Infrastructure Development*, Ashgate Publ. Limited., Hampshire.